

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TENGAH

RESOR WONOSOBO



REVISI RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
NOMOR: KEP / 36 / XI / 2025, TANGGAL 10 NOVEMBER 2025**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

Nomor: Kep / **36** / XI / 2025

Tentang

PERUBAHAN ATS SEBAGIAN ISI LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR WONOSOBO NOMOR : KEP/23/VII/2025, TANGGAL 30 AGUSTUS 2025
TENTANG REVISI RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian perencanaan jangka menengah Kepolisian Resor Wonosobo, maka disusun Revisi Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai dengan fungsi tugas dan peran Polri sehingga dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pedoman Perencanaan (Dormen) Kapolri Tahun 2025;
 2. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: KEP/1108/VII/2025 tentang tanggal 28 Juli 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
 3. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Wonosobo Nomor: KEP/30/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Revisi Rencana Strategis Kepolisian Resor Wonosobo Tahun 2025-2029;
 4. Perkiraan Keadaan Intelijen Polres Wonosobo Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO NOMOR: KEP/23/VIII/2025 TANGGAL 30 AGUSTUS 2025 TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO TAHUN 2026.

1. Mengubah sebagian isi lampiran Rencana Kerja Resor wonosobo Tahun 2026, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini yang selanjutnya sebagai Pedoman pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian dan sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja di jajaran Kepolisian Resor Wonosobo Tahun Anggaran 2026;.

Kerja.....

2. Perubahan atas sebagian isi lampiran Rencana Kerja Kepolisian Resor Wonosobo Tahun 2026 meliputi :
 - a. Perubahan atas Visi Polda Jawa Tengah dan Visi Polres Wonosobo pada hal 23;
 - b. Perubahan atas Arah Bijak dan Strategis Polda Jateng pada Hal 26;
 - c. Perubahan aras Arah Bijak dan Strategis Polres Wonosobo pada Hal 41;
 - d. Target Rencana Kerja Tahunan (RKT) Polres Wonosobo Tahun 2026 pada Lampiran I.
3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kepolisian Resor Wonosobo Nomor: KEP/23/VIII/2025 tanggal 30 Agustus 2025 tentang Rencana Kerja Kepolisian Resor Wonosobo Tahun 2026 telah diadakan perubahan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 10 November 2025



KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319

Kepada Yth. :

Distribusi A2, B dan C Polda Jateng

Tembusan:

1. Kapolda Jateng
2. Irwasda Polda Jateng
3. Karorena Polda Jateng

DAFTAR ISI

BABI PENDAHULUAN	1
1. Kondisi Umum.....	1
2. Identifikasi Masalah	20
 BAB I TUJUAN DAN SASARAN 23	
1. Visi dan Misi	23
2. Tujuan Jangka Menengah	23
3. Sasaran Prioritas.....	24
 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	26
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jateng Tahun 2026	26
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Wonosobo Tahun 2026	41
3. Program Prioritas Kapolri, Pembangunan Zona Integritas, <i>Commander Wish</i> Kapolda Jateng dan Program Kebijakan Kapolres Wonosobo	56
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN DIPA POLRES WONOSOBO T.A. 2026.....	57
1. Program Dan Kegiatan Polres Wonosobo.....	57
2. DIPA Polres Wonosobo T.A. 2026	59
 BAB V PENUTUP	61

Lampiran :

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2026
2. Renja K/L versi Bappenas Tahun Anggaran 2026

**REVISI RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh komponen masyarakat lainnya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pada tingkatan perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Dokumen perencanaan Nasional yang digunakan sebagai salah satu rujukan Naskah Rancangan Grand Strategy adalah dokumen Visi Indonesia 2045, mengingat saat ini baru di terbitkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045). Maka Polri menjabarkan rancangan RPJP Nasional dengan menyusun rancangan Grand Strategy Polri (2025-2045) yang terbagi menjadi empat tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I (periode 2025-2029) modernisasi operasional (*Operational Modernization*);
- b. Tahap II (periode 2030-2034) transformasi digital (*Digital Transformation*);
- c. Tahap III (periode 2035-2039) terobosan dan inovasi (*Innovation and Breakthrough*);
- d. Tahap IV (periode 2040-2045) budaya hukum (*Legal Culture*).

dengan berpedoman pada rancangan *Grand Strategy* Polri (2025-2045) perwujudannya sebagaimana empat tahap yang telah dicanangkan, pada tahapan ini merupakan tahap modernisasi atau pembaharuan dengan teknologi terkini serta meningkatkan instrumen baik sistem, metode, platform, senjata, performa ataupun data center sehingga dapat secara maksimal meningkatkan kemampuan, kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas operasional sesuai fungsi Polri. Modernisasi bertujuan untuk memodernisasi seluruh pelayanan dan sarana prasarana agar Polri mampu menjawab dinamika tantangan sesuai perkembangan teknologi terkini.

Tahap Modernisasi meliputi peningkatan edukasi dan kolaborasi masyarakat, perbaikan sistem, layanan, regulasi, kualitas bank data, tata kelola, kelembagaan, manajemen operasional, penguatan budaya organisasi maupun kapasitas dalam penanganan kejahatan siber serta kejahatan inkonvensional lainnya. Dalam tahap modernisasi, Polri juga memantapkan kualitas sumber daya manusia yang akan mengawaki sistem dan teknologi yang diterapkan baik integritas maupun kompetensinya.

Polri membangun kepemimpinan 2025-2029 dengan *tagline* transformasi **POLRI PRESISI** yang merupakan abreviasi dari **P**REDiktif, respon**S**ibilitas dan transparan**S**i berkeadilan. Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari POLRI PROMOTER (PROfesional, MODern, dan TERpercaya) yang telah digunakan pada periode sebelumnya, dengan pendekatan pemolisian berorientasi pemecahan masalah (*problem solving oriented policing*). Dalam kepemimpinan POLRI PRESISI, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif *predicitive*

(*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan.

Adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah:

- a. Polri yang semakin profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian yang “*Presisi*”;
- b. menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah- tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman;
- c. menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana;
- d. meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensigangguan Kamtibmas.

Untuk menjawab tantangan harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri maka Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyusun pola strategi dengan **Transformasi Menuju Polri Yang Presisi** melalui **16 Program Prioritas Kapolri**, yang terdiri dari:

- a. penataan kelembagaan;
- b. perubahan sistem dan metode Organisasi;
- c. menjadikan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*;
- d. perubahan teknologi Kepolisian *Modern Police 4.0*;
- e. pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas;
- f. peningkatan kinerja penegakkan hukum;

pemantapan.....

- g. pemantapan dukungan Polri dalam penanganan *Covid-19*;
- h. pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
- i. menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional;
- j. penguatan penanganan konflik social;
- k. peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;

Untuk mewujudkan Program Prioritas Kapolri, Polda Jawa Tengah menjabarkan kedalam konsep yang dituangkan kedalam kebijakan dan strategi Kapolda Jawa Tengah “Polda Jateng Hadir” yaitu Polda Jateng siap hadir di tengah masyarakat untuk wujudkan Jawa Tengah yang aman dan tentram. Selanjutnya untuk mewujudkan Program Prioritas Kapolri Khususnya Commander Wish Kapolda Jateng, Kapolres Wonosobo menjabarkan kedalam kebijakan dan strategi Kapolres Wonosobo dengan Program Kebijakan Polres Wonosobo yaitu **POLRES WONOSOBO TAMPIL** Dengan menerapkan program kebijakan tersebut diharapkan Polres Wonosobo benar-benar siap hadir dan tampil setiap saat di tengah masyarakat dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkontribusi guna mewujudkan harkamtibmas di wilayah hukum Wonosobo, yakni terwujudnya kondisi masyarakat wonosobo yang makmur sejahtera dengan penuh rasa damai, aman dan teratur, tagline kata TAMPIL memiliki penjabaran dari kalimat Tanggap dan Terampil,

Secara Geografis Kabupaten Wonosobo terletak antara 7.11’ dan 7,36’ Lintang Selatan (LS) 109,43’ dan 110.04’ Bujur Timur (BT) =. Jarak ke Ibukota provinsi Wonosobo Berjarak 120Km. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 275meter sampai 2.250meter diatas permukaan laut. Dalam lingkup Wilayah kabupaten Wonosobo terletak di bagian tengah yang berbatasan debfa beberaoa Kabupaten. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah Timur berbatasab debfab Kabupaten Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasa dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.

Secara administrative Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 15 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Wonosobo mencapai 98.488 hektare. 42,73 persen merupakan daerah tegalan/kebun, 16,29 persen merupakan ladang sawah dan 17,10 persen merupakan hutan Negara. Kondisi Kabupaten Wonosobo yang demikian tentunya apabila

apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat, maka merupakan kerawanan terhadap berbagai permasalahan baik berupa gangguan alam maupun masalan keamanan.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan Rencana Kerja Polres Wonosobo tahun Anggaran 2025. Perkembangan dan perubahan yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek idiologi, politik, ekonomi, social budaya dan kemanan disamping kondisi internal dan eksternal Polri yang akan dianalisis dengan pendeketan SWOT, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. perkembangan Aspek Kehidupan di wilayah Kabupaten Wonosobo

1) bidang Ideologi

- a) masih potensialnya kegiatan kelompok masyarakat untuk merubahpola pikir dengan menanamkan faham komunisme, radikalisme sebagai tindakan pembenaran dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- b) adanya upaya menghilangkan atau menjauhkan generasi bangsa dari jati dirinya, kultur, dasar negara Pancasila sebagai wawasan bermasyarakat dikaburkan oleh informasi global sehingga munculnya intoleransi, anarkhisme serta radikalisme;
- c) faham ISIS masih menjadi ancaman penyebaran dan berkembang dalam penduduk negara Islam termasuk di Wonosobo akan berpotensi berkembangnya budaya aksi teror dan kekerasan;
- d) masih potensialnya kegiatan kelompok radikal untuk melakukan kegiatan dalam rangka menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

2) bidang Politik

- a) Pasca pelaksanaan Pemilu (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada yang dilaksanakan tahun 2024 (Pileg dan Pilpres), masih akan diwarnai dengan politik Identitas, sebaran hoaks dan eksploitasi ujaran kebencian melalui media sosial yang menyumbang andil besar terjadinya polarisasi politik yang mengakibatkan adanya gesekan sosial di masyarakat yang mengancam keutuhan NKRI;
- b) Menguatnya aksi tuntutan terhadap demokratisasi, penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM dan lingkungan hidup serta

mengkritisi

mengkritisi kinerja Kabinet Pemerintahan saat ini sehingga berpotensi memunculkan isu negatif tentang Pemerintahan;

- c) Masih potensialnya konflik kepentingan dalam perpolitikan, konflik antar kelembagaan, parpol maupun politisi yang kurang harmonis sehingga memicu dinamika politik yang tidak sehat;
- d) adanya beberapa elemen masyarakat /pok oposisi yang mengkritisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, berupa kebijakan dan putusan yang akan diagendakan kelompok oposisi untuk mencari celah kelemahan terutama yang akan dilakukan oleh lawan politik maupun pok idiologi yang berseberangan dengan Pancasila guna menurunkan wibawa pemerintah dengan harapan masyarakat mudah terprofokasi menjadi aksi massa menuntut mundur presiden sebelum jabatan selesai baik turun langsung atau melalui postingan di grup Medsos.

3) bidang Ekonomi

- a) permasalahan di bidang ekonomi masih cukup kompleks di wilayah Wonosobo dengan berbagai permasalahan (perbankan, pinjol, kenaikan bahan pokok, permasalahan proyek PSN, BBM, pupuk bersubsidi, unra petani, pertambangan galian C) yang terjadi dan dapat berpengaruh terhadap situasi Kamtibmas di wilayah Wonosobo;
- b) kondisi perekonomian meningkat di tahun 2024 sehingga akan menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang mengalami peningkatan bisa kembali ke level sebelum pandemi;
- c) persaingan ekonomi akan menjadi tidak sehat dengan adanya pengusaha dalam politik dimungkinkan akan memanfaatkan pengaruh kekuasaan untuk ketahanan dalam kelangsungan asset asetnya.
- d) permasalahan di dibidang ekonomi masih cukup kompleks di wilayah Wonosobo dengan berbagai permasalahan yang terjadi dan dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat kalangan menengah ke bawah, perlu mendapat perhatian dan antisipasi sehingga tidak berpengaruh terhadap situasi kamtibmas di wilayah Wonosobo.

4) bidang

4) bidang Sosial Budaya

- a) konflik horizontal dan vertical beberapa daerah di Wonosobo yang dilatar belakangi masalah SARA, pertanahan, perkebunan, pertambangan, pendirian pabrik, pembangunan gedung dan lain-lain masih akan mewarnai situasi kemanan Wonosobo pada tahun 2025;
- b) perubahan iklim gobal dan kondisi geografis Wonosobo diperkirakan akan berdampak pada terjadinya bencana alam seperti gempa bumi , Tanah longsor dan kebakaran hutan masih akan mencadi ancaman yang dapat mempengaruhi situasi kamtibmas di tahun 2025;
- c) aksi unjuk rasa menentang terhadap keibijkann kebijakan pemerintah pusat maupun daerah karena kurangnya pemerintah melibatkan aspirasi publik dimungkinkan masih bergulir di tahun mendatang, hal ini akan mempengaruhi kondusifitas Kamtibmas;
- d) kegiatan di bidang sosial budaya di wilayah Wonosobo cukup banyak dan menyita perhatian sebagai dampak dari kegiatan masyarakat yang bersifat lokal maupun nasional. Berbagai permasalahan di bidang Pendidikan dan keagamaan serta issue terhadap aliran kepercayaan sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

5) keamanan

- a) potensi kerawanan penyebaran paham terorisme dan radikalisme baik yang secara langsung mapun propaganda melaui medsos ataupun media lainnya yang berdampak timbulnya kekerasan dan aksi terror di masyarakat yang sangat mengganggu kondusifitas kamtibmas.
- b) masih berpeluangnya bagi kelompok jaringan terorisme, radikalisme dan separatisme untuk melakukan aksinya yang sangat mengganggu Kamtibmas mendatang;
- c) peran serta masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas masih sangat kurang sehingga perlu ditumbuh kembangkan dalam peningkatan kegiatan Pos Kampling maupun peningkatan giat PKPN guna menciptakan situasi kamtibmas yang mantapdan kondusif;
- d) adanya tradisi menerbangkan balon udara oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo pada setiap perayaan Idul Fitri telah mendapatkan larangan

dari Airnav karna membahayakan penerbangan namun jal tersebut tidak dihiraukan oleh sebagian masyarakat meskipun himbauan telah diampaikan baik secara lisan maupun dimedia massa.

b. Analisis SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Wonosobo dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya, dapat dianalisis dari faktor-faktor internal maupun eksternal melalui analisis SWOT yaitu :

1) kekuatan (*Strength*)

- a) postur kekuatan Polres Wonosobo dengan Polres sebagai Kesatuan Operasional Induk dan Polsek sebagai ujung tombak pelayanan Kamtibmas prima kepada masyarakat secara bertahap ditambah kekuatan termasuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui pelatihan fungsi dan Pendidikan kejuruan secara berkesinambungan diharapkan dapat memberikan pelayanan masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan yang tergelar mulai dari tingkat Polres sampai tingkat Polsek dan Polsubsektor dengan struktur 1 Polres, 14 Polsek dan 1 Polsubsektor;
- b) berdasarkan data kekuatan personel Polres Wonosobo dari Bagian SDM Polres Wonosobo per Juli 2025, Pegawai Negeri pada Polri di Polres Wonosobo sebanyak 582 orang terdiri dari anggota Polri 574 yang meliputi 5 orang Pamen, 38 orang Pama, 531 orang Brigadir, dan PNS 8 orang;
- c) seluruh jajaran Polres Wonosobo sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya, meliputi:
 - (1) bangunan kantor:

(a) Polres	:	1 unit;
(b) polsek	:	14 unit;
(c) polsubsektor	:	1 unit;
 - (2) rumah dinas:

(a) rumah dinas Kapolres	:	1 unit;
(b) rumah dinas Wakapolres	:	1 unit;
(c) rumah dinas Kapolsek	:	4 unit;

(d) asrama

- (d) asrama Polres : 14 unit;
- (e) asrama Polsek : 8 unit;
- (3) bangunan karya/simpan timbun:
 - (a) garasi : 2 unit;
 - (b) kandang hewan/satwa : 1 unit;
- (4) bangunan karya Harwat:
 - (a) poliklinik : 1 unit;
- (5) bangunan karya/pendidikan/latihan (diklat):
 - (a) barak : 1 unit;
- (6) bangunan sosial rekreasi:
 - (a) gedung olah raga : 1 unit;
- (7) bangunan sosial usaha:
 - (a) toko koperasi : 1 unit;
 - (b) kantin : 1 unit;
- (8) bangunan sosial ibadah:
 - (a) masjid/mushola/langgar : 1 unit;
- (9) bangunan sosial sekolah umum:
 - (a) tk : 1 unit;
- (10) prasarana latihan:
 - (a) lapangan olah raga : 1 unit;
 - (b) lapangan upacara/apel : 1 unit;
- (11) materiil:
 - (a) diseluruh satker kewilayahan tingkat polsek sudah dilengkapi sarana dan prasarana kendaraan bermotor R6, R4 dan R2 serta kendaraan air, Alsus, Alkomlek sebagai sarana pendukung kegiatan operasional, meliputi :
 - i. kendaraan umum :
 - sepeda motor : 149 unit;
 - sedan : 7 unit;
 - jeep : 2 unit;
 - truck : 4 unit;
 - bus : 1 unit;

- mini bus : 21 unit;
- pick up : 19 unit;
- sepeda motor patroli : 89 unit;
- mobil patroli : 3 unit;
- mobil unir satwa : 1 unit;
- sepeda : 5 unit;
- mobil supervisi lapangan : 1 unit;
- ii. kendaraan khusus
 - ambulance : 1 unit;
 - rantis water canon : 1 unit;

(b) guna mengantisipasi kerawanan dan kasus-kasus di wilayah jajaran Polres Wonosobo, telah dilengkapi senjata api yang memadai, meliputi :

- i. revolver : 297 pucuk;
- ii. senapan gendel : 112 pucuk;
- iii. senapan semi otomatis : 28 pucuk;
- iv. senapan otomatis : 15 pucuk;
- v. senapan mesin ringan : 2 pucuk;
- vi. alsus kepolisian : 303 butir;
- vii. alsus keamanan lainnya : 5 buah.

- d) adanya kenaikan remunerasi dan tunjangan kinerja serta *reward* yang diberikan kepada personel Polres Wonosobo diharapkan dapat mendorong kinerja dan memberikan motivasi yang tinggi terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- e) kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan transnational crime (terorisme, narkoba), kejahatan terhadap kekayaan negara (illegal logging, illegal mining) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- f) meningkatnya pelaksanaan pelatihan fungsi baik pembinaan maupun operasional yang dilaksanakan oleh Polres Wonosobo, sehingga akan

menambah

menambah pengetahuan dan kemampuan personel Polri Polres Wonosobo;

- g) adanya dukungan sarana dan prasarana Polri yang semakin meningkat setiap tahunnya seperti pemenuhan alat transportasi darat berupa kendaraan bermotor untuk Bhabinkamtibmas, teknologi informasi dan komunikasi dan materil atau suku cabang tergelar sampai dengan tingkat Polsek, serta pembangunan gedung menjadi pendukung kegiatan operasional;
 - h) meningkatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Polri dalam bentuk pelayanan SIM, SKCK, SIM Online, Samsat Keliling;
- 2) kelemahan (*Weakness*)
- a) berdasarkan proyeksi penduduk BPS bahwa jumlah penduduk Wonosobo tahun 2024 sebanyak 861.589 jiwa, terus mengalami peningkatan dalam jangka waktu tahun 2015 hingga 2024 sekitar 107.537 jiwa. Pada rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kab Wonosobo menurut hasil sensus Penduduk sebanyak 422.117 jiwa, atau 50,29% dari penduduk Wonosobo. Sementara jumlah penduduk perempuan di Wonosobo menurut hasil Sensus Penduduk sebanyak 419.412 jiwa atau 49,71% dari penduduk Wonosobo, sementara jumlah anggota Polri sebanyak 582 jiwa dan PNS Polri sebanyak 9 orang, maka rasio perbandingan Penduduk: Polri yaitu 1:1400 orang belum ideal bila secara riil dari sejumlah 582 personel Polres Wonosobo tidak seluruhnya melaksanakan tugas operasional Kepolisian sehingga dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan dalam pelayanan terhadap masyarakat;
 - b) dukungan anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran Polri sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk mendukung kegiatan operasional Kepolisian dan belum dapat memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas, materiil dan kesejahteraan personel yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja Polri;
 - c) sistem pengembangan kekuatan SDM Polri yang hanya menitik beratkan pada pendekatan demografi, sehingga apabila ditinjau dari aspek Police Ratio jumlah anggota Polri belum memadai;
 - d) reformasi

- d) reformasi di bidang kultural belum menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat masih ada anggota Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya di luar ketentuan bila berurusan dengan Polri;
- e) masih rendahnya kemampuan anggota Polri dalam penguasaan bahasa asing (dihadapkan pada kejahatan transnasional yang meningkat), penguasaan teknologi komunikasi berbasis komputer, teknologi dan biokimia dibidang kriminalitas modern, dalam pengetahuan dibidang kejahatan ekonomi, perdagangan, moneter, bisnis dan lingkungan hidup yang makin dituntut selalu siap dan dapat menghadapi perubahan pola kejahatan nasional dan internasional;
- f) sifat - sifat arogan yang masih kadang terjadi dimiliki oleh sebagian oknum dapat memicu terjadinya konflik dan masyarakat antar anggota yang berakibat pada situasi Kamtibmas;
- g) masih terbatasnya sarana dan prasarana Kepolisian yang dimiliki Polres Wonosobo sampai dengan tingkat Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri di kewilayahan berdampak pada pelaksanaan tugas sehari-hari yang belum dilaksanakan secara maksimal;
- h) masih terdapat pelayanan oknum anggota Polri yang diberikan kepada masyarakat kurang simpatik dan belum maksimal sebagai anggota Polri selama melaksanakan tugas di lapangan;
- i) personel Polres Wonosobo dengan sasaran yang harus dilayani belum seimbang, sehingga mengakibatkan sebaran Polri di lapangan terasa masih kurang, hal ini masih dirasakan oleh masyarakat sebagai penghambat dalam pelayanan;
- j) masih rendahnya ketrampilan dan kemampuan personel Polri di lapangan terutama dalam segi penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis informasi teknologi di bidang kriminalitas modern dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih;

k) masih

- k) masih kurangnya peran personel Polri dalam mengemban fungsi Polmas di wilayah Wonosobo, sehingga komunikasi masyarakat dengan personel Polri tentang Kamtibmas masih belum maksimal;
 - l) peran fungsi kesempataan dalam siklus manajemen SDM Polri dan rekrutmen, Pendidikan, penugasan, pemeliharaan dan pengakhiran tugas melalui kegiatan rikkes seleksi, rikes berkala dan Kesehatan preventif kesempataan belum dapat diselenggarakan secara komprehensif;
 - m) masih kurangnya jumlah personel dalam pemenuhan satu desa/kelurahan satu bhabinkamtibmas dalam rangka deteksi dini permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
 - n) masih adanya Kecamatan yang belum memiliki Polsek sehingga Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum sesuai harapan.
- 3) peluang (*Opportunity*)
- a) program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan peluang bagi Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural;
 - b) tuntutan masyarakat yang mengharapkan pelayanan Polri secara transparan, obyektif dan akuntabel dalam bidang hukum, mendorong lembaga Kepolisian untuk meningkatkan pelayanan yang lebih professional;
 - c) tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam kompetensi dan profesionalisme kinerja Polri ditengah kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan mendorong Polri memfokuskan rencana kerjanya pada upaya meningkatkan profesionalisme dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Wonosobo;
 - d) adanya partisipasi dari Instansi pemerintah atau swasta serta mahasiswa dan pelajar yang peduli dengan Kamseltibcar Lantas, hal ini akan memotivasi inovasi jajaran Lalu Lintas untuk melakukan penyuluhan-

penyuluhan

penyuluhan, sosialisasi tentang Program lalu lintas yang baru maupun penyampaian tentang tata tertib berlalu lintas yang baik dan sopan di jalan raya serta pelajaran lalu lintas yang telah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional;

- e) makin aktifnya kontrol eksternal dari DPRD, KPK, BPK, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, Menpan RB, kaum intelektual/kampus, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta LSM termasuk media massa merupakan kepedulian dari komponen masyarakat yang memotifasi peningkatan sumber daya dan kinerja Polri untuk semakin professional;
- f) dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberian Hibah dana APBD kepada Polres Wonosobo dan jajarannya dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif;
- g) semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas Kepolisian khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan Siskamling, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM);
- h) adanya kegiatan preemtif dan preventif dengan meningkatkan kegiatan Bhabinkamtibmas, anggota Polmas dan kegiatan Turjawali oleh Polisi berseragam di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas/kejahatan di wilayah hukum Polres Wonosobo;
- i) meningkatnya kinerja Polri khususnya Polres Wonosobo dan jajarannya terutama dalam menangani 4 (empat) jenis kejahatan yaitu kejahatan transnational, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi membutuhkan penanganan yang lebih proaktif dengan mengedepankan pembangunan sinergi Kepolisian dengan lebih mendorong Polri dalam berkoordinasi, berintegrasi, dan sinkronisasi yang diwujudkan dengan membangun kerja sama yang erat (partnership) dengan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan multi dimensi baik dengan masyarakat maupun instansi teknis pelayanan publik;

j) undang-undang

- j) undang – undang dan peraturan yang mengatur tentang penanganan gangguan keamanan dalam Negeri khususnya penanganan konflik sosial melibatkan Instansi terkait secara terpadu;
 - k) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi transportasi, informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Intelijen Keamanan dapat dijadikan program dalam memodernisasi intelijen Keamanan berbasis teknologi dan pelaksanaan tugas khususnya dalam pengumpulan bahan keterangan dapat lebih efektif.
 - l) terbentuknya Forum lalu lintas dan Angkutan jalan yang terdiri dari para Stake holder lalu lintas guna pemecahan masalah keselamatan berlalu lintas
 - m) adanya penambahan Struktur baru sesuai Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK tingkat Polda yaitu Satker Bidkum dan Satker Bidhumas akan memberikan peningkatan kinerja bagi Polres Wonosobo dalam menjaga Kamtibmas dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - n) dengan adanya Program Kapolri untuk mewujudkan Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) dengan enam belas Program Prioritas diantaranya Program 01 Penataan Kelembagaan kegiatan penguatan Polsek sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan aksi pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap maka sangat diperlukan adanya pembentukan tipe kesatuan kewilayahan di Jajaran Polres Wonosobo.
 - o) tuntutan masyarakat terhadap menurunnya gangguan Kamtibmas, sehingga diperlukan terobosan kreatif dalam manajemen Operasi Kepolisian serta sinergi antar fungsi dan instansi dalam pelaksanaan tugas Operasi guna mewujudkan Kamtibmas yang kondusif.
- 4) ancaman (*Threats*)
- a) adanya kelompok masyarakat garis keras yang mengambil tindakan main hakim sendiri, sehingga dapat menyulut konflik horisontal maupun vertikal yang dapat mengganggu kamtibmas;

b) kebebasan

- b) kebebasan menyampaikan pendapat / pernyataan sikap elemen masyarakat yang disertai pengerahan massa, belum diimbangi kesadaran dan tanggungjawab masih dianggap efektif sebagai cara untuk menekan pemerintah, sehingga seringkali menimbulkan gangguan Kamtibmas antara lain merusak fasilitas publik, penyerangan terhadap petugas, gangguan terhadap pelayanan publik, aktifitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas;
- c) sebagian jaringan ISIS dan Terorisme masih terus melakukan perekrutan anggota–anggota baru, mereka melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok radikal dalam wadah JAT yang kemudian pernah menjadi JAS karena berbeda pandang atas dukungan terhadap ISIS namun ajaran radikalisme tetap menjadi ciri khas kelompok tersebut;
- d) kelompok paham ISIS terus berupaya menanamkan pengaruhnya kepada masyarakat maupun sel/jaringan terorisme yang telah ada, maka perlu penguatan fungsi Intelijen;
- e) penanganan terorisme dan radikalisme dengan cara-cara represif menimbulkan resistensi terhadap Polri, sehingga diperlukan perubahan penanganan dengan mengedepankan cara persuasif dengan memerankan fungsi Intelijen;
- f) masih berlangsungnya 4 (empat) jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, trans nasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi termasuk terorisme yang merupakan domain tugas Polri, menentukan kemampuan Intelijen Keamanan untuk mengungkap dan menaggulangi;
- g) teror dan aksi kekerasan yang terjadi merupakan upaya yang terencana dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Wonosobo untuk menciptakan kekacauan dan kerusuhan masyarakat antara lain melalui telepon, selebaran dan isu–isu yang mengatas namakan SARA;
- h) perkembangan teknologi informasi berbasis internet yang bersifat publik dan global sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan salah satunya adalah pemanfaatan teknologi untuk modus operandi peredaran narkoba;
- i) kemajuan.....

- i) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi transportasi, informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Intelijen Keamanan dapat dijadikan program dalam memodernisasi intelijen Keamanan berbasis teknologi dan pelaksanaan tugas khususnya dalam pengumpulan bahan keterangan dapat lebih efektif;
- j) ancaman aksi terorisme masih akan mewarnai sepanjang tahun mengingat Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang rawan digunakan sebagai tempat perekrutan, pelatihan maupun sasaran dari aksi teror;
- k) Potensi Gangguan (PG) keamanan masih sangat luas, mulai dari konflik-konflik yang timbul dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keanekaragaman suku, budaya dan agama, euphoria kebebasan menyampaikan pendapat, konflik kepentingan partai politik, jaringan perdagangan dan pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif), aliansi yang makin luas pada white collar crime, kejahatan terorganisir dan penguasa informal yang menjadikan penegakan hukum makin kompleks;
- l) Ambang Gangguan (AG) keamanan yang setiap saat muncul dalam kehidupan normal masyarakat baik disetiap tempat dan waktu, mulai dari persengketaan tanah atau harta warisan, terganggunya ekosistem atas bencana alam yang terjadi maupun kebakaran atas ulah manusia;
- m) Gangguan Nyata (GN) keamanan yang diakibatkan tidak teratasinya Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (AG) tersebut di atas, sehingga menyulut tindakan kejahatan di tengah kehidupan masyarakat antara lain yang tergolong dalam 4 (empat) jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional termasuk terorisme, kejahatan terhadap kekayaan Negara, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, berdampak terganggunya keamanan secara meluas dan ketidaktertiban berlalulintas sehingga memerlukan pengerahan kekuatan yang besar untuk menanggulangnya;
- n) penanganan kasus korupsi dan suap oleh KPK yang melibatkan pejabat elit politik atau pemerintah maupun swasta telah merambah keberbagai

instansi pemerintah lainnya (Dinas Perpajakan, Bea Cukai, Keuangan, Polri, Kementerian, Mahkamah Konstitusi, Legislatif, Pengusaha, Perbankan dan Kejaksaan) telah menginspirasi terhadap para pakar dan akademisi untuk merumuskan bahwa Indonesia termasuk negara yang banyak terjadi korupsi dan suap;

- o) banyaknya mantan napi narkoba dan napi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- p) munculnya obat-obatan/zat psikoaktif baru seperti golongan Cetamine, Piperazines, Synthetic Cathinones, Canabis Sintetis dan Zat tanaman dasar (Kratom), yang belum diikuti dengan aturan hukum yang mengatur;
- q) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modernisasi dan globalisasi berdampak munculnya kejahatan jenis baru (*new type crime*) dan kejahatan dimensi baru (*new dimension crime*);
- r) kejahatan korporasi timbul ke permukaan karena dampak negatif dari kebijaksanaan pemberian BLBI yang diselewengkan penggunaannya dari para banker, celah-celah kejahatan korporasi ini banyak disalahgunakan oleh mereka yang memiliki status pendidikan menengah ke atas dengan melanggar aturan-aturan yang ada, maka timbul kejahatan korporasi yang meliputi:
 - (1) pemalsuan, penipuan dan penggelapan;
 - (2) warkat bank;
 - (3) bank gelap;
 - (4) kejahatan terhadap hak cipta;
 - (5) kejahatan pajak cukai;
 - (6) kejahatan surat materai;
 - (7) penyalahgunaan kartu kredit;
 - (8) pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;
 - (9) manipulasi neraca perdagangan;
 - (10) percaloan.
- s) kegiatan politik praktis oleh kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk mengacaukan pemerintah/negara, dan penyaluran aspirasi

kepentingan masyarakat yang tidak terwadahi dengan baik, sehingga mereka mencari penyaluran lain diluar mekanisme yang ada, hal ini akan mudah memicu terjadinya gangguan Kamtibmas dan tindakan melawan hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan masyarakat;

- t) sistem politik masih diwarnai oleh pengutamaan penguasaan posisi-posisi kekuatan politik guna memperoleh akses pada kekayaan Negara dan pengaruh pada dunia usaha, serta kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan yang dimungkinkan mendorong akumulasi perundang-undangan baru yang berakibat dapat melemahkan penegakan hukum dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat pada sistem kekuasaan bangsa;
- u) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum di lapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu permasalahan;
- v) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Wonosobo;
- w) potensi gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontinjensi di beberapa daerah tertentu yang disebabkan berbagai tuntutan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat;
- x) perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil perkembangan juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat serta menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Wonosobo;
- y) meningkatnya kasus-kasus yang merugikan negara, masyarakat atau individu diantaranya kasus korupsi dan money laundering, dikarenakan

ringannya

ringannya putusan hukuman terhadap terdakwa serta masih adanya putusan bebas murni;

- z) kebijakan Pemerintah yang menghapus pajak pertambahan nilai bagi kendaraan bermotor tertentu dan kemudahan untuk memiliki kendaraan baru dengan cara kredit mendorong semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di jalan, jika tidak diantisipasi dengan perubahan infrastruktur misalnya dengan pelebaran jalan dan pendidikan tentang lalu lintas kepada pengguna jalan, maka hal tersebut berpotensi munculnya kemacetan lalu lintas, kasus laka lantas, pelanggaran lalu lintas dan kejahatan lainnya;
- aa) jumlah angka pengangguran setiap tahun semakin meningkat sementara lapangan kerja sangat terbatas, sehingga sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hukum.

2. Identifikasi Masalah

Setelah mempelajari beberapa aspek kehidupan masyarakat dan kondisi internal serta eksternal Polres Wonosobo yang dianalisis melalui analisis SWOT, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dan mungkin terjadi pada tahun 2026, yaitu:

- a. dinamika Politik Wonosobo yang meningkat dengan adanya isu politik identitas yang menyebabkan masyarakat terpolarisasi/terkotak-kotak memicu konflik horizontal dan memicu peningkatan sikap intoleransi yang dapat mengganggu pasca Pemilu tahun 2024;
- b. adanya surat edaran Menpan RB nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan Instansi yaitu menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK serta tidak melakukan perekrutan pegawai Non-ASN;
- c. eskalasi keamanan dalam Negeri yang diakibatkan adanya PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan penyebaran virus lainnya, serta dinamika Politik global sehingga memerlukan perhatian khusus Polri dalam menjaga kamtibmas yang aman dan kondusif;
- d. konflik SARA terjadi karena adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu dan paham politik menjadi pemicu munculnya

konflik.....

konflik antar etnis/suku dan umat beragama hal ini agar tidak terjadi perlu dilakukan pencegahan;

- e. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa masih akan terjadi ditahun 2026, serta masih akan tetap menyuarakan ideologinya dan menentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
- f. pelayanan prima Kepolisian yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi informasi sampai komunitas terkecil belum tergelar secara optimal sehingga masih ada komplain dari masyarakat;
- g. masih terbatasnya jumlah anggota yang memiliki sertifikasi penyidik / kualifikasi / kejuruan sebagai penyidik / penyidik pembantu serta masih ditemukan penyidik / penyidik pembantu yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya;
- h. keterbatasan penyidik yang berpengalaman dan memiliki kemampuan penguasaan IT dengan latar belakang pendidikan tindak pidana IT yang ditempatkan pada Satker yang menangani kasus cyber crime;
- i. tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga diperlukan hubungan dengan Instansi/non lembaga guna pemulihan / rehabilitasi terhadap para korbannya;
- j. peran fungsi intelijen keamanan sebagai pengemban tugas deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan ketidakseimbangan SDM yang ada untuk mengcover permasalahan yang begitu cepat berkembang di masyarakat;
- k. masih adanya penempatan personel yang tidak sesuai dengan kompetensinya, baik dari hasil pelatihan kemampuan, riwayat penugasan (keahlian) dan bersertifikat sesuai dengan fungsinya, sehingga mutasi personel masih terkesan hanya mencari pangkat / jabatan, sementara personel yang memiliki kemampuan pendidikan dan memenuhi persyaratan kesulitan untuk mendapatkan Jabatan/Pangkat;
- l. meningkatnya komplain masyarakat dan pengaduan masyarakat untuk menindak lanjuti diperlukan supervisi, asistensi dan gelar perkara, audit investigasi

khususnya

khususnya di wilayah Jajaran Polres Wonosobo dan pemeriksaan pendahuluan apabila terjadi pelanggaran disiplin/kode etik profesi polri;

- m. masih terbatasnya personel Bhabinkamtibmas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Polres Wonosobo dalam rangka pelaksanaan tugas dilapangan;
- n. masih banyak potensi konflik sosial yang berkaitan dengan pertanahan, kehutanan, pertambangan (galian C), pembangunan obyek vital dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang kenaikan BBM yang memerlukan perhatian dan penanganan secara optimal;
- o. belum optimalnya pelaksanaan pembekalan ketrampilan dan penyaluran bagi personel yang akan memasuki masa pensiun sehingga masih banyak pegawai negeri pada Polri yang pensiunnya tidak siap untuk melaksanakan usaha sendiri.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi dan Misi

a. Visi

1) visi Polda Jawa Tengah:

“Terwujudnya Jawa Tengah Yang Aman, Tertib dan Berkeadilan, melalui Kepolisian yang berorientasi pada Masyarakat ”

2) visi Polres Wonosobo

“Terwujudnya Wonosobo Yang Aman, Tertib dan Berkeadilan, melalui Kepolisian yang berorientasi pada Masyarakat”

b. Misi

a) misi Polda Jawa Tengah

Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat

b) misi Polres Wonosobo

Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat

2. Tujuan Jangka Menengah

a. Tujuan Jangka Menengah Polda Jateng

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah;
- 2) menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara;
- 3) mewujudkan SDM Polda Jateng yang cerdas, profesional dan berintegritas;
- 4) membangun sarana dan prasarana Polda Jateng yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
- 5) mentransformasi Polda Jateng menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan akuntabel.

b. Tujuan Jangka Menengah Polres Wonosobo

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Wonosobo;
- 2) menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara;
- 3) mewujudkan SDM Polres Wonosobo yang cerdas, profesional dan berintegritas;
- 4) membangun sarana dan prasarana Polres Wonosobo yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;

5)Mentransformasi

- 5) mentransformasi Polres Wonosobo menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan akuntabel.

3. Sasaran Prioritas

a. Sasaran prioritas Polda Jawa Tengah

Sasaran Prioritas Polda Jateng tahun 2026 yang disesuaikan dengan surat edaran Kapolri tentang pedoman perencanaan Kapolri Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Jawa Tengah Secara Proaktif”;
- 2) **kedua** “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polda Jateng yang Semakin Inovatif Berbasis Digital”;
- 3) **ketiga** “Menegakan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara”;
- 4) **keempat** “Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional”;
- 5) **kelima** “Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polda Jateng yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*”;
- 6) **keenam** “Meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”.

b. sasaran Prioritas Polres Wonosobo Tahun 2026

Sasaran Prioritas Polres Wonosobo tahun 2026 yang sudah disesuaikan dengan surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) **pertama** “Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Wonosobo Secara Proaktif”;
- 2) **kedua** “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polres Wonosobo yang Semakin Inovatif Berbasis Digital”;
- 3) **ketiga** “Menegakan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara”;

4) **keempat**

- 4) **keempat** “Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional”;
- 5) **kelima** “Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polres Wonosobo yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*”;
- 6) **keenam** “Meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”.

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Arah Kebijakan dan Strategis Polda Jateng Tahun 2026.

Sasaran Prioritas I “Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di Seluruh Wilayah Jawa Tengah secara Responsif dan Prediktif” terdiri dari 12 (dua belas) arah bijak sebagai berikut:

- a. meningkatkan kinerja Polri sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- b. meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;
- c. mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif;
- d. meningkatkan dan melanjutkan kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- e. mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;
- f. meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
- g. meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan “*Slum Area*”;
- h. melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan *event* nasional/ internasional serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2026;
- i. melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana;
- j. meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam negeri dan mendukung pelaksanaan kerja sama luar negeri guna terciptanya Harkamtibmas dan Gakkum;
- k. melaksanakan penggelaran kegiatan patroli kapal Polda Jateng dan mendukung kegiatan patroli pesawat udara Korpolairud Baharkam Polri di seluruh wilayah

Jawa Tengah guna mendukung kegiatan keamanan laut;

- I. meningkatkan penguatan kehadiran Polri dalam pengamanan pulau-pulau terluar berpenghuni.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polri sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. meningkatkan kegiatan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi: deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polda Jateng melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial ditengah masyarakat;
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKU7);
 - b. mengoptimalkan kegiatan penyelidikan dengan fokus pada potensi terjadinya tindak pidana terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya; (giat3143/progLidikSidik/SP1/SS2/IKU8);
 - c. penguatan program Polmas guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen- centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*);
(giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);
 - d. mendukung peningkatan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pengukuran Indeks Kamtibmas Polri;
(giat5067/progDukma/SP1/SS5/IKP1);
- 2) arah bijak: meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan

lingkungan dalam negeri melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan repository data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber *input*; (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
 - b) meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui *data-sharing platform* (termasuk notifikasi potensi ancaman kepada fungsi terkait); (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
- 3) arah bijak: mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan dan mengembangkan program berorientasi masyarakat (*community-based program*) untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan mencegah kejahatan secara kolaboratif dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat; (*giat3114,3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - b) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal- kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme; (*giat3143/progLidiksidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP 1/SS1/IKU9*);
 - c) meningkatkan dan menciptakan pendekatan adaptif kepada masyarakat dengan melibatkan peran *civil society* dan tokoh agama yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme; (*giat3143/progLidikSidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP 1/SS1/IKU9*);
 - d) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan “*stakeholder*” dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan

melaksanakan pembinaan terhadap eks napi terorisme beserta keluarganya;

(*giat3143/progLidikSidik,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU9*);

- e) meningkatkan kegiatan menetralsir informasi negatif ditengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini public guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
(*giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKP7*);
 - f) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan “edukasi” dan himbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan melalui produksi *konten kreatif*, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri;
(*giat3070,3149/progDukma/SP1/SS5/IKP7*);
 - g) meningkatkan kegiatan patroli yang adaptif di wilayah rawan kejahatan dan kriminalitas serta melaksanakan pelacakan dan penangkalandi tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata;
(*giat3130,3131,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kegiatan “*Pemolisian Prediktif*” dalam rangka *Harkamtibmas* guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya guna menumbuh kembangkan paradigm dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*);
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - b. peningkatan kegiatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - c. meningkatkan kegiatan pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP; (*giat3133,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);

- d. meningkatkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan; (*giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 5) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;
- untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a. meningkatkan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - b. meningkatkan kegiatan mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang bersifat positif; (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
 - c. meningkatkan respon cepat penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik yang dilakukan secara humanis pada saat dan pasca konflik; (*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);
- 6) arah bijak: meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
- untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a. meningkatkan pelaksanaan kegiatan kepolisian yang adaptif dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol ditengah masyarakat;
(*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - b. meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan yang adaptif di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas;
(*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
 - c. meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan yang adaptif di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung “Akselerasi Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” serta

berperan aktif ditengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
 (giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);

- 7) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan “Slum Area”;
 untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. meningkatkan kesiapsiagaan personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi “ketanggapsegeraan” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi serta di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana serta wabah;
 (giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6);
- b. meningkatkan dukungan penyelenggaraan dan pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;
 (giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
- c. meningkatkan akurasi dalam memetakan desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “Bhabinkamtibmas” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang menjadi korban saat dan pasca bencana;
 (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);
- d. meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan “pelayanan Kesehatan” dan “trauma healling” pada daerah rawan gempa dan bencana;
 (giat3072,progDukma,giat3110,progProfesionalismeSDM/SP1/SS1/IKU2/SS3/IKP1);

- 8) arah bijak: melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan event nasional/ internasional serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2026; untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. meningkatkan respon yang cepat dalam penanggulangan gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi Kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan IKN serta tahapan saat *event* nasional/internasional berlangsung; (*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);

- b. melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2026;
(*giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
- c. mendukung pelaksanaan operasi kepolisian dan pengamanan *event* nasional tahun 2026 meliputi: Provinsi Gorontalo terpilih sebagai tuan rumah Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan ke XVII Tahun 2026, Gelaran Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XI yang berlangsung di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memberikan kesan tersendiri bagi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Perguruan Tinggi LPTK di Bali ini didaulat menjadi tuan rumah untuk gelaran yang sama pada tahun 2026 atau Konaspi ke-XII. dan pengamanan *event* internasional 2026 meliputi: penyelenggaraan *World Boomerang Championships*, *Busworld South East Asia* Mei 20-22 2026; kejuaraan *World Archery Cup Series* 2026 dan *World Archery Asia Cup Series* 2026 di Bali; *World Science Forum (WSF)* Indonesia akan menjadi tuan rumah *WSF* ke-12; *Asian Futsal Cup (AFC)* Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal; *World Rally Championship (WRC)* Sumatera Utara menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk ajang balap *WRC*; *Hash International (Interhash)* Indonesia kembali menjadi tuan rumah *Interhash*; *International Conference for International Studies (ICON-IR)* Universitas Katolik Parahyangan berencana menyelenggarakan konferensi *ICON-IR* pada 4-5 Agustus 2026; *GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC)* akan diselenggarakan di *Jakarta Convention Center*; Konferensi Perdamaian Internasional, Indonesia berpotensi menjadi tuan rumah Konferensi Perdamaian Internasional dan *TAFISA Games*:
- d. Kemenpora ingin memastikan semua negara ASEAN siap menyelenggarakan *TAFISA Games*. (*giat5079,5087,3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);

- e. melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2026 meliputi:
Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan;
(giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8);
 - f. menyelenggarakan pengamanan objek vital di lokasi event;
(giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);
 - g. melaksanakan pengamanan event nasional tahun 2026 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi;
(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6);
 - h. mendukung pelaksanaan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur; (giat3130,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8);
- 9) arah bijak:melaksanakan “*backup*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana;
untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a. meningkatkan koordinasi kesiapan dari personel Polri agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka “*back up*” pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah rawan konflik;
(giat3130,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - b. meningkatkan sinergisitas dalam membangun kerja sama dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif; (giat5076,5087,5080/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8);
 - c. meningkatkan pelaksanaan “*back up*” pengamanan kegiatan ditengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
(giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);
 - d. meningkatkan pelaksanaan “*back up*” kegiatan pengamanan di kawasan obvitnas dan objek tertentu; (giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5);
 - e. meningkatkan pelaksanaan “*back up*” pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya narkoba;
(giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3);

10) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam negeri dan mendukung pelaksanaan kerja sama luar negeri guna terciptanya Harkamtibmas dan Gakkum;

untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. meningkatkan pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementrian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergisitas dengan “*stakeholder*” terkait; (*giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
- b. mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama internasional guna mendukung kerja sama Kepolisian Internasional, Organisasi Internasional dan kerja sama bilateral serta multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra positif Polri/ Indonesia di mata internasional; (*giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);

11) arah bijak: melaksanakan penggelaran kegiatan patroli kapal Polda Jateng dan mendukung kegiatan patroli pesawat udara Korpolairud Baharkam Polri di seluruh wilayah Jawa Tengah guna terwujudnya keamanan laut;
untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. meningkatkan pelaksanaan kegiatan patroli kapal Polri dan “*back up*” di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum; (*giat3134,4342/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4*);
- b. mendukung pelaksanaan kegiatan “*back up*” patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polda Jateng dalam rangka pemantauan wilayah perairan yang rawan kejahatan; (*giat3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4*);
- c. meningkatkan kegiatan pengamanan pada jalur niaga dan jalur pelayaran di perairan Jawa Tengah; (*giat3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4*);

12) arah bijak: meningkatkan penguatan kehadiran Polri dalam pengamanan pulau-pulau terluar berpenghuni;

untuk mewujudkan arah bijak 12, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan

dilakukan yaitu:

- a. meningkatkan kegiatan kolaborasi operasional Polri bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di pulau berpenghuni; (*giat3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4*);
- b. melaksanakan kegiatan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan serta obvit/obvitnas serta penguatan kehadiran Polri di pulau berpenghuni;
(*giat3130,3131,3135,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4*);

Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Berkualitas dan Terintegrasi”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda;
- 2) meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
- 3) meningkatkan “*ketanggap segeraan*” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, harkamtibmas dan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a. meningkatkan layanan pengaduan berbasis *hotline*, *website* atau *media social* guna meningkatkan citra Polri yang responsif dan tidak *berbelit-belit*; (*giat3071/progDukma/SP2/SS5/IKU7*);
 - b. meningkatkan kolaborasi dalam penanganan pelayanan pengaduan guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat menyampaikan keluhannya; (*giat3089,3091,5086/progLidikSidik,Dukma/SP2/SS2/IKU9/SS5/IKP7*);
- 2) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan

dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. meningkatkan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta adaptif dalam pelayanan di kantor pelayanan/keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat melalui penguatan SuperApp, e-SIM, Samsat Digital, dan integrasi basis data kendaraan serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian; (*giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
 - b. meningkatkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor perluasan layanan daring, interoperabilitas sistem (SIM, STNK, tilang), dan pembaruan infrastruktur digital; (*giat3133/progHarkamtibmas/giat3071,5055/progDukma/SP 2/SS1/IKU1*);
 - c. meningkatkan inovasi layanan yang adaptif bagi masyarakat serta efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi *afirmatif* (menguatkan); (*giat3133,3071/progHarkamtibmas,progDukma/SP2/SS1/IKP4 b*);
 - d. meningkatkan *update* informasi dan dokumentasi pada layanan/laman *website humaspolri.go.id* secara berkala guna meningkatkan citra positif Polri dimata masyarakat; (*giat5056/progDukma/SP2/SS5/IKP7*);
 - e. meningkatkan inovasi dan perbaikan yang adaptif dalam memberikan pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online*; (*giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU11*);
 - f. meningkatkan kegiatan penilaian atas kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajarannya; (*giat3072/progDukma/SP2/SS1/IKU*);
 - g. meningkatkan kegiatan *Binmas Online System (BOS)* dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam memberikan respon cepat atas penerbitan surat ijin operasional BUJP; (*giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU2*);
- 3) arah bijak: meningkatkan “*ketanggap segera*” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, harkamtibmas dan penegakkan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); untuk mewujudkan arah bijak 3, maka

terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. melanjutkan, melaksanakan Monev dan terus mengkaji guna merespon aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit-belit; (*giat4339,5053/progDukma/SP2/SS5/IKP4*);
- b. meningkatkan “*Respon Time*” dalam kesiapan untuk memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (*giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU3*);
- c. meningkatkan dan merespon pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu yang lebih adaptif melalui pembinaan teknis dan audit; (*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU5*);

Sasaran Prioritas III “Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:

- 1) mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- 2) meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik Polri;
- 3) meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
- 4) mendukung peningkatan peran adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dipusat data dan informasi kriminal nasional;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 11 (sebelas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a. meningkatkan kolaborasi dan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia;(*giat3134,4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU7*);
 - b. meningkatkan kegiatan penyelidikan dari ancaman tindak pidana

terorisme, dan mendukung pelaksanaan penindakan serta penyidikan terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*giat3143/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU8*);

- c. meningkatkan kegiatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dengan serta tindak pidana siber, judi *online*, penyelundupan barang, korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, terorisme, Karhutla/LHserta siber termasuk kejahatan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (*giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/IKU3/IKU4*);
- d. meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian dibidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan); (*giat3142,3145,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU4*);
- e. melaksanakan kegiatan penindakan tindak pidana di perairan dalam mendukung kegiatan keamanan laut; (*giat4342/progSidikLidik/SP3/SS2/IKU7*);
- f. melaksanakan dan meningkatkan kegiatan penanganan/ penindakan tindak pidana dan pelanggaran Lalu Lintas melalui integrasi kamera Pemda, *private sector* dan pelatihan personel dalam rangka mewujudkan “*Road Safety*” serta penegakkan hukum melalui “*ETLE*” dan tilang manual; (*giat3133/progHarkamtibmas,4343/progSidikLidik/SP3/SS1/IKU1/SS2/IKU6*);
- g. melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; (*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU8*);
- h. meningkatkan penanganan kejahatan di ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas serta mengedukasi masyarakat; (*giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2*);

1. Arah Kebijakan dan Strategis Polres Wonosobo Tahun 2026

Arah kebijakan dan strategi Polres Wonosobo akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Polri yang telah ditetapkan pada Grand Strategi Polri. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Polres Wonosobo diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi Polda Jateng saat ini dan kondisi yang ingin dicapai oleh Polres Wonosobo pada tahun 2029. Arah kebijakan Polres Wonosobo periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sasaran strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)
- b) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/Informasi dengan mengembangkan^{Dan} penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S)
- c) mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita) meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;

- d) mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian online dan transaksi cryptocurrency; (Asta Cita)
 - e) meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita)
 - f) meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita)
- 2) peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
 - b) menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*); (G.S, Quickwins)
 - c) mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi *online*, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita)
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
 - e) mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergitas dengan institusi penegak hukum lainnya (*zero terrorist attack*); (Asta Cita)
 - f) meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui Smart Policing (misalnya, *Smart Police Stations*, *hotline* terintegrasi, *police superapp*, *panic button*); (G.S, Quickwins)
 - g) mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri;
- 3) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (G.S)
 - b) meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (G.S, *Quickwins*)
 - c) Mendukung pelaksanaan integrase sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
 - d) Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (G.S)
 - e) meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya;
- 4) peningkatan system kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) mendukung peningkatan peran dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan transnasional dan misi perdamaian internasional;
 - c) meningkatkan sumber informasi dan *networking* yang memadai melalui Interpol. c) meningkatkan
 - d) meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - e) memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- 5) Penguatan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan *data analytics*;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; (G.S)
 - b) mengelola data *analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
 - c) meningkatkan penanggulangan berita negatif (*hoaks*) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;
 - d) mendukung penguatan sistem informasi Polri berbasis “Big Data Polri” dalam operasional Polri dengan memperhatikan INA Digital;
 - e) melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter “*update*” secara akurat dan tepat waktu;
 - f) menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline, police superapp, Whats App for business*); (G.S)
 - g) meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)
- 6) meningkatkan kehadiran Polri ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Wonosobo;
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, ^{untuk} penurunan stunting serta swasembada pangan);
 - b) meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
 - c) meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita)
 - d) menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita)
 - e) menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)

- f) mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan dikompetesi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita).
 - g) mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
 - h) menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita)
 - h) mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita).
- 7) peningkatan kegiatan sadar Kantibmas bagi masyarakat;
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
 - c) memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kantibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kantibmas;
- 8) Mendukung Peningkatan pelaksanaan Operasi Kepolisian termasuk pengamanan pembangunan di Ibukota Negara Baru;
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung penguatan kegiatan operasi kepolisian di tingkat Mabes hingga ke wilayah;
 - b) melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
 - c) mendukung kegiatan operasi pengamanan sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur;
 - d) meningkatkan efektivitas pengamanan Markas Polri di kewilayahan;

- 9) peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita)
 - b) menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Sasaran strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) Peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber; (Asta Cita)
 - c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita)
 - d) mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita)
 - e) mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita)
 - f) meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi *online*);
 - g) menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;

- h) memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
 - i) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita)
 - j) meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di perairan Jawa Tengah; (Asta Cita)
 - k) memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polri agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (G.S, *Quickwins*)
 - l) mengoptimalkan penanganan kejahatan transnasional di wilayah Wonosobo;
 - m) menyelenggarakan dukungan pemeriksaan identifikasi DNA (Kemenlu);
 - n) memperkuat penerapan "*keadilan restoratif serta peran mediasi*" dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
- 2) Mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung pengintegrasian sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan dan Kerja Sama Internasional; (G.S)
 - b) mendukung pengembangan standardisasi data criminal nasional;
 - c) mendukung pengembangan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
 - d) memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di lingkungan Polri; (G.S)
- 3) Percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "keadilan restoratif" terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita)
- b) mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA)
- 4) Memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis dan akuntabel;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jateng merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Mendukung penyediaan fasilitas rehabilitasi medis tindak pidana Narkoba;
 - b) membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
 - c) mengoptimalkan SP2HP dalam penanganan perkara.
 - 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidik;
 - b) memperkuat sinergitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal dan gangguan Kamtibmas lainnya;

- c. Sasaran Strategis " Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres wonosobo yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polres wonosobo yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;

- b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polres wonosobo yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
 - c) meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
 - d) meningkatkan jumlah SDM Polres wonosobo yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
 - e) mendukung pengembangan program kerja sama Diklat dalam dan luar negeri;
 - f) meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
 - g) memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polres wonosobo berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
 - h) menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bhayangkara dalam diri personel Polri;
 - i) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polres wonosobo berbasis teknologi dan data *analytics*;
 - j) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita)
- 2) Pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel, dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polri; (G.S)
 - b) memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
 - c) menerapkan *system reward and punishment* berbasis kinerja;
 - d) menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*); (G.S)

- e) meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
 - f) meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Jateng; (Asta Cita)
 - g) meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polres Wonosobo secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - h) melaksanakan kebijakan zero growth dalam rekrutmen kepolisian dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)
 - i) memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
 - j) melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Satker baru dalam rangka pengembangan organisasi;
 - k) meningkatkan kesehatan SDM Polres Wonosobo secara fisik, psikis, dan mental;
- 3) Mendukung pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) melakukan pendataan personel yang berminat pindah ke Ibu Kota Negara Baru; a) Melakukan
 - b) mendukung roadmap pemindahan personel Bintara baru yang selesai mengikuti pendidikan pembentukan untuk ditempatkan di Ibu Kota Negara Baru.
- d. Sasaran Strategis “Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) modernisasi sarana dan prasarana Polres Wonosobo; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polres Wonosobo tahun 2025-2029 dalam pemenuhan Alamsus untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis MEPE untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)

- b) mendukung peningkatan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI POLRI (*I.T Enterprise Architecture*); (G.S);
 - c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polres sampai tingkat kewilayahan; (Asta Cita)
 - d) melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);
 - e) mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan *Data Digital Platform and Software (DDPS)* serta pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;
 - f) mendukung Pembangunan dan penguatan kapabilitas analitik *Big Data/ Single Data Entry* Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri; (G.S) membangun dan mengimplementasikan *smart security* di seluruh Markas Kepolisian;
 - g) menyiapkan pembangunan ruang dan fasilitas kerja bagi SDM Polri berkebutuhan khusus;
 - h) mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;
 - h) Mengembangkan
 - i) memperkuat sistem data dan informasi hukum Polri;
 - j) meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polri;
 - k) mendukung pengintegrasian sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
 - l) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian; (Asta Cita)
- 2) pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) menyempurnakan system manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)

- b) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polri;
 - c) menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polres;
 - d) pembangunan Mako Polsek dan Asrama Polsek.
- e. Sasaran Strategis “Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri serta peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polri dengan menstandarisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; (G.S)
 - b) menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita)
 - c) meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal nasional; c) meningkatkan
 - d) meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Markas Polres Wonosobo;
 - e) memperkuat keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
 - f) meningkatkan pengelolaan citra Polri di masyarakat;
 - g) memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPR yang dapat mendukung kinerja Polri;
 - h) menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);
 - i) meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (*Quickwins*)
 - 2) penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;
- b) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)
- c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polres sampai dengan Polsek dengan standard pelayanan di UPP Polri;
- d) mendukung pelaksanaan pengkajian dan penataan tugas (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Mabes sampai Kewilayahan guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model *shared services*; (G.S)
- e) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri ditingkat Polres sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; (G.S)
- f) Meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan optimal dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S)
- g) mendukung pengkajian dan penyederhanaan birokrasi yang lebih ramping dan tepat ukuran (*right sizing*), pengaturan organisasi yang memprioritaskan keberadaan jabatan fungsional dalam pengaturan susunan organisasi, dan pengalihan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional, khususnya di tingkat Mabes Polri;
- h) melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;
- i) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
- j) memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan

memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)

- 3) penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polres Wonosobo;
 - b) melakukan penyelarasan kinerja Polri sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S)
 - c) membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
 - d) memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polres Wonosobo;
 - e) mendukung penguatan sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polri yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat *real time*;
- 4) penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Wonosobo merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut: Untuk
 - a) meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
 - b) mendukung peningkatan mekanisme pengelolaan bantuan hukum untuk kejahatan lintas negara dalam penanganan kejahatan lintas negara;
 - c) meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri;
 - d) mendukung percepatan proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polri;

4. Program Prioritas Kapolri, Pembangunan Zona Integritas, *Commander Wish* Kapolda Jateng dan Program Kebijakan Kapolres Wonosobo.

a. Program Prioritas Kapolri

- 1) penataan kelembagaan;
- 2) perubahan sistem dan metode organisasi;
- 3) menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0;

- 4) perubahan teknologi Kepolisian Modern Police 4.0;
 - 5) pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas;
 - 6) peningkatan kinerja penegakkan hukum;
 - 7) pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19;
 - 8) pemulihan ekonomi nasional (PEN);
 - 9) menjamin keamanan Program Prioritas Nasional;
 - 10) penguatan penanganan konflik social;
 - 11) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
 - 12) mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi;
 - 13) pemantapan komunikasi publik;
 - 14) pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;
 - 15) penguatan fungsi pengawasan;
 - 16) pengawasan oleh masyarakat (*Public Complaint*).
- b. Zona Integritas
- 1) manajemen Perubahan;
 - 2) penataan Tatalaksana;
 - 3) penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
 - 4) penguatan Pengawasan;
 - 5) penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 6) peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 3) penataan
- c. *Commander Wish* Kapolda Jateng:
- 1) loyalitas tegak lurus kepada pimpinan tertinggi Polri;
 - 2) tingkatkan soliditas 3 pilar plus;
 - 3) antisipasi serangan teror dan rusuh massa;
 - 4) perkuat manajemen media;
 - 5) dukung percepatan penanganan covid-19;
 - 6) mantapkan harkamtibmas jelang pilkada dan pilkades serentak th 2020;
 - 7) Polda Jateng “Hadir”.
- d. “POLRES WONOSOBO TULUS DAN RELIGIUS”

IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU IDEAL POLRES WONOSOBO T.A. 2026

1. Program Dan Kegiatan Polres Wonosobo

a. Program Profesionalisme SDM Polri

1) tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan value organisasi.

2) kegiatan

3096 dukungan manajemen dan Teknik profesionalisme SDM Polri;

3107 Pengendalian Pegawai Polri.

b. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

1) tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) kegiatan:

3137 Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;

3140 penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan TP;

3142 penindakan tindak pidana umum;

3144 penindakan tindak pidana narkoba;

3145 penindakan tindak pidana korupsi;

3146 penindakan tindak pidana siber;

3151 penindakan tindak pidana laka lantas

4343 penindakan tindak pidana lalu lintas

5083 penindakan tindak pidana tertentu;

5085 koordinasi dan pengawasan PPNS.

c. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri;

1) tujuan:

Terpeliharanya

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) kegiatan:

5059 dukungan manajemen dan teknik sarpras;

5061 pengembangan perbekalan umum;

5062 pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri.

d. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

1) tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerjasama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

2) kegiatan:

3112 analisis keamanan;

3114 penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;

3115 penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;

3116 penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;

3117 penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;

3120 kerjasama keamanan dan ketertiban K/L;

3128 dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

3130 pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;

3131 penyelenggaraan pengamanan objek vital;

3133 peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;

5076 pembinaan potensi keamanan;

5079 pembinaan operasi Kepolisian;

5081 pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban;

e. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri;

1) tujuan:

Terwujudnya

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerjasama lintas sektor.

2) kegiatan:

- 3070 penerangan masyarakat;
- 3073 dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- 3088 pertanggungjawaban profesi;
- 3089 penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
- 3090 penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
- 3091 penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;
- 3154 pemberian bantuan dan nasehat hukum;
- 3155 kerjasama dan penyuluhan hukum;
- 5051 penyusunan kebijakan strategi Polri;
- 5053 reformasi birokrasi Polri;
- 5054 manajemen anggaran;

2. Pagu Indikatif Polres Wonosobo T.A. 2026

Pagu Indikatif Polres Wonosobo Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 81.973.754.000,- (Delapan puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.52.185.009.000,- (lima puluh dua serratus delapan puluh lima juta sembilan ribu rupiah) Belanja Barang Rp. 19.232.620.000,- (Sembilan Belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Program Profesionalisme SDM Polri: Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) meliputi kegiatan:

- 3096 dukungan manajemen dan Teknik profesionalisme SDM Polri : Rp.10.000.000,-
- 3107 Pengendalian Pegawai Polri Rp. 15.000.000,-

b. Program

- b. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana : Rp. 2.563.535.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) meliputi kegiatan:
- 3137 Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana : Rp. 286.160.000;
 - 3140 penyelenggaraan identifikasi lidik sidik tindak pidana : Rp. 32.770.000,-
 - 3142 penindakan tindak pidana umum : Rp. 1.414.040.000,-
 - 3144 penindakan tindak pidana narkoba : Rp. 458.554.000,-
 - 3145 penindakan tindak pidana ekonomi khusus : Rp. 34.440.000,-
 - 3146 penindakan tindak pidana korupsi : Rp. 160.000.000,-
 - 3151 penindakan tindak pidana siber : Rp. 25.830.000,-
 - 4343 penindakan tindak pidana laka lantas : Rp. 128.521.000,-
 - 5083 penindakan tindak pidana tertentu : Rp. 17.220.000,-
 - 5085 koordinasi dan pengawasan PPNS : Rp. 6.000.000,-
- c. Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri : Rp. 11.965.537.000,- (sebelas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) meliputi kegiatan:
- 5059 dukungan manajemen dan teknis Sarpras : Rp. 3.258.969.000,-
 - 5061 pengembangan perbekalan umum : Rp. 1.956.653.000,-
 - 5062 pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri Rp. 6.749.915.000,-
- d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat : Rp. 9.332.048.000,- (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) meliputi kegiatan:
- 3112 analisis keamanan : Rp. 33.140.000,-
 - 3114 penyelenggaraan Strakam bidang politik : Rp. 315.715.000,-
 - 3115 penyelenggaraan Strakam bidang ekonomi : Rp. 315.715.000,-
 - 3116 penyelenggaraan Strakam bidang sosial budaya : Rp. 315.715.000,-
 - 3117 penyelenggaraan Strakam bidang Kamneg : Rp. 316.085.000,-
 - 3120 kerjasama keamanan dan ketertiban K/L : Rp. 6.800.000,-
 - 3128 dukungan manajemen Harkamtibmas : Rp. 3.250.220.000,-
 - 3130 pembinaan pelayanan fungsi Sabhara : Rp. 787.050.000,-
 - 3131 penyelenggaraan pengamanan objek vital : Rp. 329.200.000,-

- 3133 peningkatan Yan Kamselmas di bidang Lantas : Rp. 1.122.044.000,-
- 5076 pembinaan potensi keamanan : Rp. 1.576.180.000,-
- 5079 pembinaan operasi Kepolisian : Rp. 883.884.000,-
- 5081 Pelacakan dan Penangkalan Kamtib : Rp. 80.300.000,-
- e. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri :
Rp. 52.523.634.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam
ratus tiga puluh empat ribu rupiah) meliputi kegiatan:
 - 3070 penerangan masyarakat : Rp. 151.220.000,-
 - 3073 dukungan pelayanan internal perkantoran Polri : Rp. 52.185.009.000,-
 - 3088 pertanggungjawaban profesi : Rp. 10.000.000,-
 - 3089 penyelenggaraan pengamanan internal Polri : Rp. 16.400.000,-
 - 3090 penegakan tata tertib dan disiplin Polri : Rp. 36.000.000,-
 - 3091 penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan : Rp. 51.950.000,-
 - 3154 pemberian bantuan dan nasehat hukum : Rp. 7.780.000,-
 - 3155 kerjasama dan penyuluhan hukum : Rp. 16.100.000,-
 - 5051 penyusunan kebijakan Polri : Rp. 8.240.000,-
 - 5053 reformasi birokrasi Polri : Rp. 25.760.000,-
 - 5054 manajemen anggaran : Rp. 15.175.000,-

V. PENUTUP

Demikian Revisi Rencana Kerja Kepolisian Resor Wonosobo Tahun Anggaran 2026 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2026 di jajaran Kepolisian Resor Wonosobo.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319



LAMPIRAN I :
REVISI RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2026



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA / PENDUKUNG		TARGET	KET
	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Wonosobo yang terkendali, melalui kepolisian yang berintegritas, modern dan akuntabel	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Wonosobo	4.67	SASARAN IMPACT
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif	IKU1	Indeks Harkamtibmas	85.10	
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis Akuntabel dan Berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum	96.78	
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Wonosobo yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Wonosobo	64.80	
		IKP2	Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polres Wonosobo	89.27	
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern	IKP3	Tingkat Pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>	68.27	
		IKP4	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Data	3.75	
SS5	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel	IKP5	Nilai AKIP	78.76	
		IKP6	Penyajian Laporan Keuangan yang Akuntabel	3	
		IKP7	Capaian Reformasi Birokrasi	72.40	
		IKP8	Nilai Kinerja Anggaran	99.35	

IKP12 Prosentase

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA / PENDUKUNG	TARGET	KET
		IKP9 Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	100	
		IKP10 Prosentase Penyelesaian masalah Hukum yang Dihadapi Polri	100	

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 10 Agustus 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319



**LAMPIRAN II :
REVISI RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA VERSI BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2026**



FORMULIR I :
REVISI RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA VERSI BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
REVISI RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
2. VISI : Terwujudnya Wonosobo yang aman dan tertib
3. MISI : 1. Melindungi;
 2. Mengayomi;
 3. Melayani.

1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target 2026	Alokasi 2026
IK IMPACT					
Stakeholder					
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Wonosobo yang terkendali, melalui kepolisian yang berintegritas, modern dan akuntabel	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Wonosobo	4.67	
IK UTAMA					
Internal Process					
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif	IKU1	Indeks Harkamtibmas	85.10	
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis Akuntabel dan Berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum	96.78	
IK PENUNJANG					
Innovation					
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Wonosobo yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Optimal	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Wonosobo	64.80	
		IKP2	Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polres Wonosobo	89.27	
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang	IKP3	Tingkat Pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equitment (MEPE)</i>	68.27	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target 2026	Alokasi 2026
	Berdaya Guna dan Modern	IKP4	Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Data	3.75	
SS5	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel	IKP5	Nilai AKIP	78.76	
		IKP6	Penyajian Laporan Keuangan	3	
		IKP7	Capaian Reformasi Birokrasi	72.40	
		IKP8	Nilai Kinerja Anggaran	99.35	
		IKP9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100	
		IKP10	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polri	100	
Jumlah				68.841.584.000	

2. Program dan Pendanaan

Kode	Program	Pendanaan Tahun 2025 (ribu rupiah)					Prakiraan Kebutuhan (ribu rupiah)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2027	2028	2029
BD	Program Profesionalisme SDM Polri	17.500	0.0	0.0	0.0	17.500	18.375	19.294	20.259
BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.348.666	0.0	128.521	0.0	2.477.187	2.601.046	2.731.098	2.867.653
BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri	4.967.207	0.0	849.095	0.0	5.816.302	6.107.117	6.412.473	6.733.097
BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.115.384	0.0	1.859.758	0.0	9.975.142	10.473.899	10.997.594	11.547.474
WA	Program Dukungan Manajemen	52.345.004	0.0	0.0	0.0	52.345.004	54.962.254	57.710.367	60.595.885
Jumlah		68.841.584.000	0.00	2.837.374	0.00	70.631.135	74.162.691	77.870.826	81.764.368

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319

**FORMULIR II :
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA VERSI BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Kementrian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Sasaran Strategis : Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kabupaten Wonosobo
3. Program : Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. Unit Organisasi : Kepolisian Resor Wonosobo
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2026	Alokasi 2026
01	Terjaganya ketertiban social dalam masyrakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan		9.975.142
01.01	Terjaganya ketertiban social dalam masyrakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan	84.90	0
Total			9.975.142

6. **Output Program dan Indikator Output Program**

Kode	Output Program / Indikator Output Program	Target 2026	Alokasi 2026
01	Layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat		9.975.142
01.01	Indeks Harkamtibmas	84.90	0
Total			9.975.142

7. **Kegiatan dan Pendanaan**

Kode	Kegiatan	Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2028	2029	2029
3112	Analisis keamanan	33.140	0.0	0.0	0.0	34.797	36.537	36.537	38.364
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Politik	314.420	0.0	1.295	0.0	331.501	348.076	348.076	365.480
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Ekonomi	314.420	0.0	1.295	0.0	331.501	348.076	348.076	365.480
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Sosial Budaya	314.420	0.0	1.295	0.0	331.501	348.076	348.076	365.480

Kode	Kegiatan	Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2028	2029	2029
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Keamanan Negara	314.420	0.0	1.665	0.0	331.889	348.83	348.483	365.907
3120	Kerjasama Keamanan dan Ketertiban K/L	6.800	0.0	0.0	0.0	7.140	7.497	7.497	7.872
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3.218.696	0.0	194.080	0.0	3.583.415	3.762.586	3.762.586	3.950.715
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	0.0	0.0	376.500	0.0	406.665	426.998	426.998	448.348
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	0.0	0.0	276.104	0.0	289.909	304.404	304.404	319.624
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	0.0	0.0	994.394	0.0	1.044.114	1.096.320	1.096.320	1.151.136
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	1.694.237	0.0	13.130	0.0	1.792.735	1.882.372	1.882.372	1.976.491
5079	Pembinaan Operasi Kepolisian	929.627	0.0	0.0	0.0	976.108	1.024.913	1.024.913	1.076.159
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	883.884	0.0	0.0	0.0	928.078	974.482	974.482	1.023.206
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	80.520	0.0	0.0	0.0	84.546	88.773	88.773	93.212
Total		8.115.384	0.0	1.859.758	0.0	9.975.142	10.473.899	10.997.593	11.547.474

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.
A.I.U.N KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319

FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Kementrian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Sasaran Strategis : P enegakkan hukum secara berkeadilan
3. Program : Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
4. Unit Organisasi : Kepolisian Resor Wonosobo
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2026	Alokasi 2026
01	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi		2.477.187
01.01	persentase pengungkapan tindak pidana konvensional.	69.43	
01.02	persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.	100.00	
01.03	persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara.	100.00	
01.04	persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi	100.00	
Total			2.477.187

6. **Output Program dan Indikator Output Program**

Kode	Output Program / Indikator Output Program	Target 2026	Alokasi 2026
01	layanan penegakkan hukum oleh Polri		2.477.187
01.01	Indeks Penegakkan hukum Polri		
Total			2.477.187

7. **Kegiatan dan Pendanaan**

Kode	Kegiatan	Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2027	2028	2029
3140	penyelenggaraan identifikasi lidik sidik tindak pidana	32.770	0.0	0.0	0.0	32.770	34.409	36.129	37.935
3142	penindakan tindak pidana umum	1.596.632	0.0	0.0	0.0	1.596.632	1.676.464	1.760.287	1.848.301
3144	penindakan tindak pidana narkoba	458.554	0.0	0.0	0.0	458.554	481.482	505.556	530.834

Kode	Kegiatan	Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2027	2028	2029
3145	penindakan tindak pidana ekonomi khusus	34.440	0.0	0.0	0.0	34.440	36.162	37.970	39.869
3146	penindakan tindak pidana korupsi	160.000	0.0	0.0	0.0	160.000	168.000	176.400	185.220
3151	penindakan tindak pidana siber	43.050	0.0	0.0	0.0	43.050	45.203	47.463	49.836
4343	penindakan tindak pidana laka lintas	0.0	0.0	128.521	0.0	128.521	134.947	141.694	148.779
5083	penindakan tindak pidana tertentu	17.220	0.0	0.0	0.0	17.220	18.081	18.985	19.934
5085	koordinasi dan pengawasan PPNS	6.000	0.0	0.0	0.0	6.000	6.300	6.615	6.946
Total		2.348.666	0.0	128.521	0.0	2.477.187	2.601.048	2.731.099	2.867.654

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



[Signature]
M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319

FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Kementrian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Sasaran Strategis : Profesionalisme SDM Polres Wonosobo
3. Program : Program Profesionalisme SDM Polri
4. Unit Organisasi : Kepolisian Resor Wonosobo
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2026	Alokasi 2026
01	terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara professional		17.500
01.01	terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara professional		
Total			17.500

6. **Output Program dan Indikator Output Program**

Kode	Output Program / Indikator Output Program	Target 2026	Alokasi 2026
01	SDM Polri yang kompeten		17.500
01.01	persentase SDM Polri yang memenuhi kompetensi minimal		0
Total			17.500

7. **Kegiatan dan Pendanaan**

Kode	Kegiatan	Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2027	2028	2029
3096	Dukungan Manajemen dan Teknis profesionalisme SDM Polri	10.000	0,0	0,0	0,0	10.000	10.500	11.025	11.576
3107	Pengendalian Pegawai Polri	7.500	0,0	0,0	0,0	0,0	7.875	8.269	8.682
Total		17.500	0,0	0,0	0,0	17.500	18.375	19.294	20.258

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 830913192

FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Kementrian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Sasaran Strategis : Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polres Wonosobo
3. Program : Modernisasi Teknologi Polres Wonosobo
4. Unit Organisasi : Kepolisian Resor Wonosobo
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2026	Alokasi 2026
01	terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal		5.816.302
01.01	persentase pemanfaatn Almatsus dan Sarpras		
Total			5.816.302

6. **Output Program dan Indikator Output Program**

Kode	Output Program / Indikator Output Program	Target 2026	Alokasi 2026
01	Almatsus dan Sarpras		5.816.302
01.01	persentase pemebuhan Almatsus dan Sarpras		
Total			5.816.302

7. **Kegiatan dan Pendanaan**

Kode	Kegiatan	Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2027	2028	2029
5059	Duk manajemen dan teknis Sarpras	2.760.239	0.0	221.150	0.0	2.981.389	3.130.458	3.286.981	3.451.330
5061	Pengembangan Perbekalan Umum	1.528.968	0.0	627.945	0.0	2.156.913	2.264.759	2.377.997	2.496.897
5062	Pengembangan Faskon Polri	678.000	0.0	0.0	0.0	678.000	711.900	747.495	784.870
Total		4.966.412	0.0	849.890	0.0	5.816.302	6.107.114	6.412.473	6.733.097

Ditetapkan di : Wonosobo
 Pada tanggal : 10 November 2025
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



[Signature]
 M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319

FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Kementrian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Sasaran Strategis : Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polres Wonosobo
3. Program : dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
4. Unit Organisasi : Kepolisian Resor Wonosobo
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2026	Alokasi 2026
01	terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan		52.345.004
01.01	persentase pemenuhan layanan internal yang berkualitas		
Total			52.345.004

6. **Output Program dan Indikator Output Program**

Kode	Output Program / Indikator Output Program	Target 2026	Alokasi 2026
01	layanan kepada internal Polri		52.345.004
01.01	jumlah layanan yang di berikan sesuai SOP		
Total			52.345.004

7. **Kegiatan dan Pendanaan**

Kode	Kegiatan	Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2027	2028	2029
3070	penerangan masyarakat	151.220	0.0	0.0	0.0	151.220	158.781	166.720	175.056
3073	dukungan pelayanan internal perkantoran Polri	52.006.379	0.0	0.0	0.0	52.006.379	54.606.698	57.337.033	60.203.885
3088	pertanggungjawaban profesi	10.000	0.0	0.0	0.0	10.000	10.500	11.025	11.576
3089	penyelenggaraan pengamanan internal Polri	16.400	0.0	0.0	0.0	16.400	17.220	18.081	18.985

Kode	Kegiatan	Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Kebutuhan		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2027	2028	2029
3090	penegakan tata tertib dan disiplin Polri	36.000	0.0	0.0	0.0	36.000	37.800	39.690	41.675
3091	penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan	51.950	0.0	0.0	0.0	51.950	54.548	57.275	60.139
3154	pemberian bantuan dan nasehat hukum	7.780	0.0	0.0	0.0	7.780	8.169	8.577	9.006
3155	kerjasama dan penyuluhan hukum	16.100	0.0	0.0	0.0	16.100	16.905	17.750	18.638
5051	penyusunan kebijakan Polri	8.240	0.0	0.0	0.0	8.240	8.652	9.085	9.539
5053	reformasi birokrasi Polri	25.760	0.0	0.0	0.0	25.760	27.048	28.400	29.820
5054	manajemen anggaran	15.175	0.0	0.0	0.0	15.175	15.934	16.731	17.568
Total		52.345.004	0.0	0.0	0.0	52.345.004	54.962.255	57.710.367	60.595.887

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



M. Kasim Akbar Bantilan
M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2026
(REKAPITULASI PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (060)

Kode	Program	Pendanaan Tahun 2026 (ribu rupiah)					Prakiraan Kebutuhan (ribu rupiah)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2027	2028	2029
BD	Program Profesionalisme SDM Polri	17.500	0.0	0.0	0.0	17.500	18.375	19.294	20.259
BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.348.666	0.0	128.521	0.0	2.477.187	2.601.046	2.731.098	2.867.653
BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri	4.967.207	0.0	849.095	0.0	5.816.302	6.107.117	6.412.473	6.733.097
BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.115.384	0.0	1.859.758	0.0	9.975.142	10.473.899	10.997.594	11.547.474
WA	Program Dukungan Manajemen	52.345.004	0.0	0.0	0.0	52.345.004	54.962.254	57.710.367	60.595.885
Jumlah		67.793.761	0.00	2.837.374	0.00	70.631.135	74.162.691	77.870.826	81.764.368

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



[Signature]
M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2026
(RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (060)

Kode	Program/Kegiatan	Pendanaan Tahun 2026 (ribu rupiah)					Prakiraan Kebutuhan (ribu rupiah)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2027	2028	2029
BD	Program Profesionalisme SDM Polri	17.500	0.0	0.0	0.0	17.500	18.375	19.294	20.259
3096	Dukungan Manajemen dan Teknis profesionalisme SDM Polri	10.000	0,0	0,0	0,0	10.000	10.500	11.025	11.576
3107	Pengendalian Pegawai Polri	7.500	0,0	0,0	0,0	0,0	7.875	8.269	8.682
BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.348.666	0.0	128.521	0.0	2.477.187	2.601.046	2.731.098	2.867.653
3140	penyelenggaraan identifikasi lidik sidik tindak pidana	32.770	0.0	0.0	0.0	32.770	34.409	36.129	37.935
3142	penindakan tindak pidana umum	1.596.632	0.0	0.0	0.0	1.596.632	1.676.464	1.760.287	1.848.301
3144	penindakan tindak pidana narkoba	458.554	0.0	0.0	0.0	458.554	481.482	505.556	530.834
3145	penindakan tindak pidana ekonomi khusus	34.440	0.0	0.0	0.0	34.440	36.162	37.970	39.869
3146	penindakan tindak pidana korupsi	160.000	0.0	0.0	0.0	160.000	168.000	176.400	185.220
3151	penindakan tindak pidana siber	43.050	0.0	0.0	0.0	43.050	45.203	47.463	49.836
4343	penindakan tindak pidana laka lantas	0.0	0.0	128.521	0.0	128.521	134.947	141.694	148.779
5083	penindakan tindak pidana tertentu	17.220	0.0	0.0	0.0	17.220	18.081	18.985	19.934
5085	koordinasi dan pengawasan PPNS	6.000	0.0	0.0	0.0	6.000	6.300	6.615	6.946
BP	Program Modernisasi Almitsus dan Sarpras Polri	4.967.207	0.0	849.095	0.0	5.816.302	6.107.117	6.412.473	6.733.097
5059	Duk manajemen dan teknis Sarpras	2.760.239	0.0	221.150	0.0	2.981.389	3.130.458	3.286.981	3.451.330
5061	Pengembangan Perbekalan Umum	1.528.968	0.0	627.945	0.0	2.156.913	2.264.759	2.377.997	2.496.897
5062	Pengembangan Faskon Polri	678.000	0.0	0.0	0.0	678.000	711.900	747.495	784.870

Kode	Program/Kegiatan	Pendanaan Tahun 2026 (ribu rupiah)					Prakiraan Kebutuhan (ribu rupiah)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2027	2028	2029
BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.115.384	0.0	1.859.758	0.0	9.975.142	10.473.899	10.997.594	11.547.474
3112	Analisis keamanan	33.140	0.0	0.0	0.0	34.797	36.537	36.537	38.364
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Politik	314.420	0.0	1.295	0.0	331.501	348.076	348.076	365.480
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Ekonomi	314.420	0.0	1.295	0.0	331.501	348.076	348.076	365.480
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Sosial Budaya	314.420	0.0	1.295	0.0	331.501	348.076	348.076	365.480
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Keamanan Negara	314.420	0.0	1.665	0.0	331.889	348.483	348.483	365.907
3120	Kerjasama Keamanan dan Ketertiban K/L	6.800	0.0	0.0	0.0	7.140	7.497	7.497	7.872
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3.218.696	0.0	194.080	0.0	3.583.415	3.762.586	3.762.586	3.950.715
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	0.0	0.0	376.500	0.0	406.665	426.998	426.998	448.348
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	0.0	0.0	276.104	0.0	289.909	304.404	304.404	319.624
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	0.0	0.0	994.394	0.0	1.044.114	1.096.320	1.096.320	1.151.136
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	1.694.237	0.0	13.130	0.0	1.792.735	1.882.372	1.882.372	1.976.491
5079	Pembinaan Operasi Kepolisian	929.627	0.0	0.0	0.0	976.108	1.024.913	1.024.913	1.076.159
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	883.884	0.0	0.0	0.0	928.078	974.482	974.482	1.023.206
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	80.520	0.0	0.0	0.0	84.546	88.773	88.773	93.212
WA	Program Dukungan Manajemen	52.345.004	0.0	0.0	0.0	52.345.004	54.962.254	57.710.367	60.595.885
3070	penerangan masyarakat	151.220	0.0	0.0	0.0	151.220	158.781	166.720	175.056
3073	dukungan pelayanan internal perkantoran Polri	52.006.379	0.0	0.0	0.0	52.006.379	54.606.698	57.337.033	60.203.885
3088	pertanggungjawaban profesi	10.000	0.0	0.0	0.0	10.000	10.500	11.025	11.576
3089	penyelenggaraan pengamanan internal Polri	16.400	0.0	0.0	0.0	16.400	17.220	18.081	18.985

Kode	Program/Kegiatan	Pendanaan Tahun 2026 (ribu rupiah)					Prakiraan Kebutuhan (ribu rupiah)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2027	2028	2029
3090	penegakan tata tertib dan disiplin Polri	36.000	0.0	0.0	0.0	36.000	37.800	39.690	41.675
3091	penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan	51.950	0.0	0.0	0.0	51.950	54.548	57.275	60.139
3154	pemberian bantuan dan nasehat hukum	7.780	0.0	0.0	0.0	7.780	8.169	8.577	9.006
3155	kerjasama dan penyuluhan hukum	16.100	0.0	0.0	0.0	16.100	16.905	17.750	18.638
5051	penyusunan kebijakan Polri	8.240	0.0	0.0	0.0	8.240	8.652	9.085	9.539
5053	reformasi birokrasi Polri	25.760	0.0	0.0	0.0	25.760	27.048	28.400	29.820
5054	manajemen anggaran	15.175	0.0	0.0	0.0	15.175	15.934	16.731	17.568
Jumlah		67.793.761	0.00	2.837.374	0.00	70.631.135	74.162.691	77.870.826	81.764.368

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 10 November 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO



[Signature]
M. KASIM AKBAR BANTILAN, S.I.K., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83091319